



RENCANA KERJA

STASIUN PPMHKP

MERAUKE

TAHUN 2026



Alamat :

Jalan Garuda Spadem, Merauke, Papua Selatan

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Stasiun PPMHKP) Merauke sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maka Stasiun PPMHKP Merauke menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI dan ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Merauke Merauke Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Merauke untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Merauke sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Merauke, 15 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Merauke



Shamingan, S.St.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang	6
Tugas dan Peran Organisasi	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi	10
Arah Kebijakan	13
Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja.....	13
Penutup	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2024	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Tahun 2026.....	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun PPMHKP Merauke tahun 2026.....	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025 – 2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 - 2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan. Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke 2025 - 2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang tetap harus

menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi dipasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2026 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Stasiun PPMHKP Merauke sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Stasiun PPMHKP Merauke cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke pada tahun 2026.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun PPMHKP Merauke adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Merauke Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun PPMHKP Merauke tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun PPMHKP Merauke pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025 - 2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: "Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan

Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan

pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-P-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem

pengawasan PNBP berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 - 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Stasiun PPMHKP Merauke telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Stasiun PPMHKP Merauke telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Merauke TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai).	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	88

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks))	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	77
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	77
		12.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	89

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu

antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Stasiun PPMHKP Merauke tahun anggaran 2026 sebesar **Rp. 3,482,698,000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Merauke untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Merauke dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Stasiun PPMHKP Merauke Merauke Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke	3,297,717,000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	111,981,000
3	Manajemen Mutu	73,000,000
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Tahun 2026		3,482,698,000

Penutup

Rencana kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BPPMHKP Merauke pada tahun 2026 sebesar **3,482,698,000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 3,297,717,000**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 73,000,000**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 111,981,000**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

(032)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORG

(13)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

UNIT KERJA

(649704)

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALOKASI

Rp. 3,482,698,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			184,981,000	
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			111,981,000	
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	15.0 produk		92,375,000	
3989.PDC.002	Lokasi : KAB. MERAUKE Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	15.0 produk		92,375,000	
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			92,375,000	U
A	Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan			20,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.068-Merauke)			3,140,000	PNP
	Koordinasi/Dialog dalam rangka Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan Di Ruang Rapat Kantor			3,140,000	
	- Snack untuk 20 Peserta	20.0 OK	42,000	840,000	
	- Konsumsi 20 Orang	20.0 OK	85,000	1,700,000	
	- Spanduk	1.0 Paket	600,000	600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.068-Merauke)			13,860,000	PNP
	> Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri kegiatan penerapan SPDI			13,860,000	
	- Uang Harian (1 Orang x 4Hari)	4.0 OH	580,000	2,320,000	
	- Transport PP	1.0 OK	11,540,000	11,540,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.068-Merauke)			3,000,000	PNP
	- Uangf Transport dalam rangka Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan	20.0 OH	150,000	3,000,000	
B	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar			12,375,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.068-Merauke)			12,375,000	PNP
	> Perjalanan Dinas dalam dalam Rangka HACCP Dasar			12,375,000	
	- Uang Harian (1 Orang x 4Hari)	4.0 OH	580,000	2,320,000	
	- Transport PP	1.0 OK	8,195,000	8,195,000	
	- Penginapan (1 Orang x 3 Malam)	3.0 OH	620,000	1,860,000	
C	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)			60,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.068-Merauke)			4,750,000	PNP
	> Koordinasi/Dialog Pelaku Usaha dalam Rangka ruang lingkup produk pada UPI Di Ruang Rapat Kantor			4,750,000	
	- Snack untuk 20 Peserta	30.0 OK	42,000	1,260,000	
	- Konsumsi 20 Orang	30.0 OK	85,000	2,550,000	
	- Spanduk	1.0 Paket	940,000	940,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke)			50,000,000	A
	- Belanja Bahan Laboratorium	1.0 Paket	50,000,000	50,000,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			5,250,000	
	Uang Transport dalam rangka Sertifikat Hazard				
	- Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	35.0 OH	150,000	5,250,000	
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>	10.0 Lembaga, Badan Usaha		6,606,000	

3989.PDF.002	Lokasi : KAB. MERAUKE Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	10.0 Lembaga		6,606,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			6,606,000	U
B	<i>Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan</i>			3,960,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			3,960,000	
	- Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB Kapal	1.0 Tahun	3,960,000	3,960,000	
C	<i>Sertifikasi CPIB pada Pembenihan</i>			2,646,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			2,646,000	
	- Inspeksi dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan	18.0 OK	147,000	2,646,000	
3989.QIA	<u>Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]</u>	1.0 Produk		7,000,000	

3989.QIA.001	Lokasi : KAB. MERAUKE Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	1.0 Produk		7,000,000	
051	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik			7,000,000	U
A	<i>Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI</i>			7,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke)			4,600,000	A
	- Spanduk kegiatan Inpres	1.0 Paket	1,600,000	1,600,000	*
	- Pembelian Sampel (2 Kali X 1 Lokus) dilakukan 2 Kali dalam setahun	2.0 Lokus	1,500,000	3,000,000	*
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.068-Merauke)			2,400,000	
	- Transport Lokal dalam Rangka Pengambilan Sampel (2 Kali X 4 Orang X 2 Lokus)	16.0 OH	150,000	2,400,000	
3989.QIC	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]</u>	1.0 Lembaga		6,000,000	

3989.QIC.002	Lokasi : KAB. MERAUKE UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.0 Lembaga		6,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			6,000,000	U
A	<i>Jumlah Unit produksi primer yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan</i>			1,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Biaya Uji Logam Berat	1.0 Paket	1,000,000	1,000,000	PNP
B	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			5,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.068-Merauke) - Inspeksi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	50.0 OK	100,000	5,000,000	
7010	Manajemen Mutu			73,000,000	PNP
7010.PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan		39,500,000	
7010.PBR.001	Lokasi : KAB. MERAUKE Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		39,500,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			39,500,000	U
A	Penerapan SMM Lembaga Inspeksi 17020			39,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Biaya Pendaftaran	1.0 Paket	1,500,000	1,500,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Biaya Surveilien	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	PNP
	- Biaya Pertanggunggugatan selama setahun	1.0 Tahun	500,000	500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.068-Merauke) - Penginapan 1 Orang X 2 Hari	4.0 Paket	1,200,000	4,800,000	
	- Transport (1 Orang X 1 Kegiatan) PP	1.0 Paket	26,960,000	26,960,000	PNP
	- Uang Harian 1 Orang X 3 Hari	3.0 Paket	580,000	1,740,000	
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga		33,500,000	
7010.PDD.002	Lokasi : KAB. MERAUKE Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		33,500,000	U
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			33,500,000	
A	Penerapan SMM Laboratorium Penguji 17025			33,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Biaya Iuran Tahunan	1.0 Paket	1,500,000	1,500,000	PNP
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.068-Merauke) - Biaya Surveilien	1.0 Paket	7,000,000	7,000,000	
	- biaya Uji banding	2.0 Paket	1,500,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.068-Merauke)			22,000,000	A
	- Transport (1 Orang X 1 Kegiatan) PP	1.0 OK	16,320,000	16,320,000	*
	- Penginapan 1 Orang X 2 Hari	1.0 OH	2,200,000	2,200,000	*
	- Uang Harian 2 Orang X 3 Hari	6.0 OH	580,000	3,480,000	*
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			3,297,717,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			3,297,717,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	15.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,297,717,000	
	Lokasi : KAB. MERAUKE				
3987.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		65,735,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			65,735,000	U
A	Layanan Umum dan Rumah Tangga			44,706,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			3,216,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Rapat/ Pertemuan/ Koordinasi dengan KPPN Merauke dan Instansi terkait lingkup Kab. Merauke	1.0 Tahun	3,216,000	3,216,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			41,490,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	> Perjalanan Dinas Biasa Temu Teknis bidang kepegawaian untuk Ka. TU			16,778,000	
	- Transport (1 Kali X 1 Org) PP	1.0 OK	11,828,000	11,828,000	
	- Penginapan (1 Orang X 4 Malam)	4.0 OH	700,000	2,800,000	
	- Uang Harian (1 Orang X 5 Hari)	5.0 OH	430,000	2,150,000	
	> Perjalanan Dinas Biasa REKON SAK dan SIMAK BMN			16,778,000	
	- Transport (1 Kali X 2 Org) PP	1.0 OK	11,828,000	11,828,000	
	- Penginapan (1 Orang X 4 Malam)	4.0 OH	700,000	2,800,000	
	- Uang Harian (2 Org X 5 OH)	5.0 OH	430,000	2,150,000	
	> Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi Pimpinan			7,934,000	
	- Transport (1 Kali X 1 Org) PP	1.0 OK	5,784,000	5,784,000	
	- Uang Harian (1 Orang X 5 Hari)	5.0 OH	430,000	2,150,000	
	> Perjalanan Dinas Biasa Rapat Koordinasi Nasional			0	
B	Temu Koordinasi Umum			13,570,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			13,570,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	> Perjalanan Dinas Temu Koordinasi			13,570,000	
	- Transport (1 Kali X 1 Org) PP	1.0 OK	9,340,000	9,340,000	
	- Penginapan (1 Orang X 2 Malam)	2.0 OH	420,000	840,000	
	- Uang Harian (1 Orang X 5 Hari)	10.0 OH	339,000	3,390,000	
C	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1,280,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.068-Merauke) - Pencetakan Laporan LKJ TW I sampai dengan TW IV dan CALK Triwulan I sampai dengan Triwulan IV	8.0 Kali	160,000	1,280,000	RM
D	<u>Layanan Manajemen Keuangan</u>			6,179,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.068-Merauke) > Perjalanan Dinas Rapat Penyusunan Program - Transport (1 Kali X 2 Org) PP	1.0 OK	6,179,000	6,179,000	RM
3987.EBA.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	14.0 Layanan		3,231,982,000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			2,615,796,000	U
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>			2,615,796,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Gaji Pokok PNS/Gaji Ke 13/ Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	621,804,000	621,804,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Pembulatan Gaji PNS/ke13/ke 14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	16,000	16,000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Suami / Istri PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	63,925,000	63,925,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Anak PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	21,132,000	21,132,000	RM
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Struktural PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	22,010,000	22,010,000	RM
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Fungsional PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	54,735,000	54,735,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. PPh PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	4,793,000	4,793,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Beras PNS dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	56,863,000	56,863,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Uang Makan PNS dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	127,491,000	127,491,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB	(032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG	(13)	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA	(649704)	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI	Rp. 3,482,698,000	

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511135	<u>Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Daerah Terpencil / Sangat Terpencil PNS dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	24,357,000	24,357,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	88,380,000	88,380,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Umum PNS/ke13/ke14 dengan jumlah pegawai 10 orang	1.0 THN	13,778,000	13,778,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Gaji Pokok PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	245,995,000	245,995,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	5,000	5,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	14,637,000	14,637,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Anak PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	21,782,000	21,782,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Fungsional PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	4,025,000	4,025,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunj. Beras PPPK dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	24,181,000	24,181,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Uang Makan PPPK dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	24,891,000	24,891,000	RM
511631	<u>Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK/Gaji ke 13/ Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	21,810,000	21,810,000	RM
511632	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK/Gaji ke 13/Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	26,163,000	26,163,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			15,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK/Gaji ke 13/ Gaji ke 14 dengan jumlah pegawai 6 orang	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.068-Merauke)			17,650,000	RM
	- Uang Lembur dan Uang Makan Gol II, Gol III dan Gol IV	1.0 THN	17,650,000	17,650,000	
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			8,424,000	RM
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Gol II, Gol III	1.0 THN	8,424,000	8,424,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.068-Merauke)			837,176,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai Untuk 10 Pegawai	1.0 THN	837,176,000	837,176,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.068-Merauke)			254,773,000	RM
	- Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK untuk 6 Pegawai	1.0 Tahun	254,773,000	254,773,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			616,186,000	U
<i>C</i>	<i>Perawatan Gedung Kantor</i>			107,775,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.068-Merauke)			107,775,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Papua Selatan)	1.0 THN	107,775,000	107,775,000	
<i>D</i>	<i>Perawatan Sarana Kantor</i>			47,796,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke)			47,796,000	
	- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	1.0 UNIT	5,400,000	5,400,000	SBM
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	1.0 THN	8,997,000	8,997,000	
	- Pemeliharaan Printer	19.0 UNIT	621,000	11,799,000	SBM
	- Pemeliharaan Listrik dan Audio Visual, Server dan jaringan Internet	1.0 Tahun	21,600,000	21,600,000	
<i>E</i>	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4</i>			73,194,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke)			73,194,000	
	- Kendaraan Roda 4 selama setahun	1.0 UNIT	37,440,000	37,440,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua)	1.0 UNIT	35,754,000	35,754,000	
<i>F</i>	<i>Operasional Perkantoran</i>			193,595,000	RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.068-Merauke)			78,985,000	
	- Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	1.0 Tahun	10,000,000	10,000,000	
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Papua Selatan)	1.0 Tahun	36,985,000	36,985,000	
	- Langganan Internet dan zoom	1.0 Tahun	32,000,000	32,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (649704) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
ALOKASI Rp. 3,482,698,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.068-Merauke) - Biaya Pengiriman Surat dinas dan keperluan kantor lainnya	1.0 Tahun	1,050,000	1,050,000	RM
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.068-Merauke) - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) - Bendahara Penerimaan untuk 12 Bulan	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 36.0 OB 1.0 OB	1,180,000 1,150,000 470,000 410,000 300,000 646,000	16,081,000 15,612,000 6,221,000 5,517,000 12,325,000 646,000	SBM SBM SBM SBM SBM RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Barang Habis Pakai	1.0 THN	17,500,000	17,500,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.068-Merauke) - Belanja Barang Out sorsing	1.0 THN	39,658,000	39,658,000	RM
G	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			88,696,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.068-Merauke) - Listrik 12 Bulan	1.0 Tahun	84,000,000	84,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.068-Merauke) - Telepon	12.0 BLN	97,820	1,174,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.068-Merauke) - Air	12.0 BLN	293,460	3,522,000	RM
H	<u>Honor Pengelola SAI</u>			11,830,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.068-Merauke) - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) - Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 36.0 OB	200,000 200,000 150,000 150,000	2,348,000 2,400,000 1,800,000 5,282,000	SBM SBM SBM SBM
I	<u>Perawatan Kendaraan Bormotor Roda 2</u>			51,300,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.068-Merauke) - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	15.0 Unit	3,420,000	51,300,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(032)
(13)
(649704)
Rp. 3,482,698,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu			6,000,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			6,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Layanan Tamu	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
K	Belanja Sewa			36,000,000	
522141	Belanja Sewa			36,000,000	RM
	(KPPN.068-Merauke)				
	- Sewa Gedung Arsip	1.0 Tahun	36,000,000	36,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Merauke, 15 Juni 2026



M. S. St. Pi
NIP.198303022007011001